

**PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PROVINSI LAMPUNG PADA
TAHUN 2012-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Bidang
Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

**GEBY RESTA DAMARA
NPM 1551010187**

Program Studi :Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PROVINSI LAMPUNG PADA
TAHUN 2012-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Bidang
Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

**GEBY RESTA DAMARA
NPM 1551010187**



pembimbing I : Any Eliza, S.E, M.Ak.

pembimbing II : A. Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Upah minimum regional merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Penetapan upah yang tinggi atau tidak sesuai dengan standar menyebabkan kenaikan harga-harga yang ada dipasaran, hal ini menyebabkan daya beli masyarakat berkurang dan menurunkan taraf hidup tenaga kerja. Ketika seorang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari angka kebutuhan hidup layak maka nutrisi para pekerja lebih baik maka mereka akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan dampaknya meningkat output yang merupakan output tersebut mendorong angka pertumbuhan ekonomi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional secara parsial dan simultan di Provinsi Lampung dan bagaimana upah minimum regional di Provinsi Lampung. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional secara parsial dan simultan di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui dan menjelaskan upah minimum regional dalam di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif dan skala pengukuran variabel menggunakan skala rasio. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_2) sedangkan variabel terikatnya adalah upah minimum regional (Y) dengan objek penelitian di Provinsi Lampung. Sumber data menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data *time series* dan teknik sampel yang digunakan jumlah sampel 7 tahun yakni tahun 2012-2018.

Hasil penelitian menyatakan secara parsial tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum regional di Provinsi Lampung dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum regional di Provinsi Lampung. Sedangkan secara simultan atau uji secara bersama-sama dinyatakan bahwa tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap upah minimum regional di Provinsi Lampung. Nilai R square sebesar 0,922 atau 92,2%. Artinya variabel dependennya yakni upah minimum regional dapat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas yakni tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 92,2 % dan sisanya 7,8% bersumber dari kesalahan acak ataupun dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini atau model lain. Dalam perspektif ekonomi setiap muslim diharuskan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonominya begitupun dengan daerah wajib menetapkan UMR yang baik. Upah minimum regional di Provinsi Lampung belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang dianjurkan dalam ekonomi islam bahwa upah pekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah kebutuhan hidup layak dalam suatu masyarakat.

Kata kunci : *Upah Minimum Regional, Tingkat Inflasi, Petumbuhan Ekonomi*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Geby Resta Damara
NPM : 1551010187
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2018"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 26 Desember 2019
Penyusun



Geby Resta Damara
NPM. 1551010187



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2018

Nama : Geby Resta Damara

NPM : 1551010187

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004

Pembimbing II

A. Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I.
NIP. 198809292019031010

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2018"**, Oleh **Geby Resta Damara**, NPM: 1551010187, Jurusan: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Jum'at 03 Januari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

Sekretaris : Dania Hellin Amrina, S.E., M.Sc

Penguji 1 : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Penguji 2 : A. Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ص وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan". (Q.S. At-Taubah: 105).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang telah memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan dari lubuk hati penulis yang paling dalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya, Ayahanda Kusmara dan Ibunda Junariah. Yang sangat saya cintai, hormati, dan saya banggakan. Terimakasih yang tiada terhingga telah senantiasa memberikan saya kasih sayang, doa yang tulus dan ikhlas, serta memberikan saya kasih sayang, doa yang tulus dan ikhlas, serta memberikan saya segala dukungan selama ini baik *suppot* moril maupun *support* materil sehingga bisa membangkitkan rasa semangat saya agar selalu kuat, tabah dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang saya impikan. Semoga Allah SWT memuliakan Ayahanda dan Ibunda baik di dunia maupun akhirat.
2. Kakak saya Galang Leo Narky, adik-adik tercinta Gita Nia Damara dan Gianin Cahya Damara yang sangat saya sayangi. Terimakasih telah menjadi salah satu motivasi dan semangat saya dalam menuntut ilmu.
3. Almamater tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung. Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah tempat saya menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Geby Resta Damara dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 07 Desember 1996 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Kusmara dan Ibu Junariah. Riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan TK di TK Perwanida Kecamatan Teluk Betung Selatan, yang diselesaikan pada tahun 2003.
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 01 Pahoman, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.
3. Melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 01 Tanjung Karang, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.
4. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 06 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.
5. Kemudian tahun 2015 meneruskan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada prodi Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 26 Desember 2019
Penulis,

Geby Resta Damara
1551010187

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2018”**, dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islamm guna memperoleh gelar sarjana. Penyelesaian skripsi ini tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua prodi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Any Eliza, S.E., M.Ak (Pembimbing I) dan A. Hazas Syarif, M.E.I (Pembimbing II) sebagai dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan masukan, saran, kritik dan telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta motivasi kepada penulis.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung telah memberikan informasi, data dan referensi
6. Ridwan Aji Sanjaya terimakasih untuk motivasi serta dukungan selama melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat yang sudah bersama selama sembilan tahun Novita Purnama Sari, Ayu Maya Sari, Oktavia Rahmawati, Abu Abdullah Muhammad, M. Dzaki Arifin dan M. Nur Ali yang senantiasa selalu ada memberikan dorongan, semangat motivasi selama ini. Sahabat yang sudah seperti saudara kandungku Nurhaliza terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama melaksanakan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan prodi Ekonomi Syariah kelas E angkatan 2015 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, terkhusus untuk sahabat-sahabatku Semlehoy Arini Wijayanti, Ayu Avinda Nova, Elsa Devi Komalasari, Rofiqoh Hasanah, Sri Wahyuni, Tri Susanti terimakasih untuk doa, dukungan serta semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan

saran-saran guna melengkapi penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 26 Desember 2019
Penulis,

Geby Resta Damara
1551010187



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah Minimum Regional.....	18
1. Pengertian Upah	22
2. Dasar Hukum Upah Minimum	24
3. Penetapan Upah Minimum	25
4. Teori Upah.....	26
5. Dinamika Pengupahan.....	32
6. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam	33
B. Tingkat Inflasi	
1. Pengertian Inflasi.....	37
2. Teori Inflasi	39
3. Jenis-Jenis Inflasi.....	41

4. Akibat Buruk Inflasi	42
5. Hubungan Tingkat Inflasi dengan Upah Minimum Regional	43
6. Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	44
C. Pertumbuhan Ekonomi	
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	48
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	49
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	53
4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Upah Minimum Regional.....	56
5. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	57
D. Kajian Pustaka.....	60
E. Kerangka Pikir	62
F. Hipotesis.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	69
B. Sumber Data.....	70
C. Metode Pengumpulan Data.....	71
D. Populasi Dan Sampel	71
E. Variabel Penelitian Dan Definisi Oprasional.....	72
F. Teknik Analisis Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tempat penelitian	80
B. Deskripsi Data.....	85
C. Analisis Data	86
1. Uji Validitas	86
2. Uji Reliabilitas.....	87
3. Uji Asumsi Klasik	
a) Uji Normalitas	87
b) Uji Multikolineritas	88
c) Uji Autokorelasi	89
d) Uji Heteroskedasitas	90

4. Analisis Regresi Berganda	92
5. Hasil Uji Hipotesis	
a) Hasil Uji T	93
b) Hasil Uji F	95
6. Koefisien Determinasi	96
D. Pembahasan	
1. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional secara parsial di Provinsi Lampung tahun 2012-2018.....	97
2. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional secara simultan di Provinsi Lampung tahun 2012-2018.....	102
3. Upah Minimum Regional di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Upah Minimum Regional Sumatera Tahun 2012-2018	6
Tabel 1.2 Upah Minimum Regional dan Kebutuhan Hidup Layak Provinsi Lampung Tahun 2012-2018	8
Tabel 1.3 Laju Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2012-2108.....	10
Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2012-2018	12
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	73
Tabel 4.1 Daftar Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan	84
Tabel 4.2 Data Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional Provinsi Lampung Tahun 2012-2018.....	85
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	86
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	87
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	87
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	88
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	89
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	90
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Berganda.....	92
Tabel 4.10 Hasil Uji T.....	93
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	95
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	96
Tabel 4.13 Inflasi Provinsi Lampung dan Upah Minimum Regional.....	97
Tabel 4.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional.....	10



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Regional

Provinsi Lampung Tahun 2012-2018

Lampiran 2 : Uji Validitas

Lampiran 3: Uji Reliabilitas

Lampiran 4: Uji Multikolinearitas

Lampiran 5: Uji Autokorelasi

Lampiran 6 : Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 7 : Uji Regresi Berganda

Lampiran 8 : Hasil Uji T

Lampiran 9 : Hasil Uji F

Lampiran 10 : SK Pembimbing

Lampiran 11 : Kartu Konsultasi Pembimbing



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi judul ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah lain ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **"Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2018"**. Penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Pengaruh menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah daya ada dan timbul dari suatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹
2. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu : kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus.²

¹Pusat bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 849

²Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h.359

3. Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.³
4. Upah minimum adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Upah merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Upah pekerja perlu cukup layak dan terus meningkat supaya dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upah di Provinsi Lampung belum sesuai dengan harapan masyarakat, jika dibandingkan dengan daerah lain Provinsi Lampung masih dikategorikan rendah, tidak sesuai dengan laju inflasi,

³ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2013), h. 14.

⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.102.

pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya, karena salah satu faktor yang mempengaruhi upah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan upah ini tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan sebagai penetapan upah, dan perkembangan upah yang mengalami perubahan dan diduga disebabkan oleh laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi.

Dari penjelasan tersebut peneliti ingin meneliti apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung. Adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan judul sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali permasalahan tersebut.

2. Secara Subjektif

Peneliti optimis bahwa Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai *literature* yang di butuhkan dalam Penelitian sebagai referensi. Selain itu, judul yang peneliti ajukan sesuai dengan jurusan peneliti yaitu Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu permasalahan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Prinsip kebijakan upah minimum adalah memberikan perlindungan bagi pekerja untuk memperoleh upah yang layak dengan tetap memperhatikan faktor produktivitas dan kemajuan perusahaan . Mekanisme kelembagaan penetapan upah minimum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, mulanya ditetapkan oleh menteri kemudian didelegasikan kewenangan pada gubernur. Pada awalnya penentuan upah minimum didasarkan pada pemenuhan kebutuhan fisik minimum (KFM), kemudian diubah menjadi berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM), dan selanjutnya kebutuhan hidup layak (KHL).⁵

Dengan berbagai kondisi empiris dan penjelasan tentang implementasi dari kebijakan upah minimum diatas, sebenarnya segala produk hukum termasuk kebijakannya tidak boleh melenceng dari prinsip dasar hukum yaitu

⁵ Ambar Dwi Santoso, Bonar M.Sinaga, Sri Hartoyo, dan M. Parulian Hutagaol, “Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Migrasi Internal Di Sulawesi Selatan”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411-0903 : Eissn: 2443-2660, Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 177-187, h. 177.

Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula dengan kebijakan upah minimum harus mengacu pada UUD tersebut yang secara jelas dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebutlah yang seharusnya dijadikan standar baku bagi penetapan upah minimum. Meskipun demikian, disamping penghidupan yang layak bagi pekerja beberapa perhitungan perlu dilakukan dalam menentukan tingkat upah minimum, seperti misalnya menjaga produktivitas usaha dan keberlanjutan kondisi ekonomi nasional (dan daerah).⁶

Pekerja memiliki kepentingan terhadap upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan perusahaan berusaha melakukan efisiensi biaya agar dapat memaksimalkan laba. Kepentingan yang berbeda antara perusahaan dengan pekerja mengenai upah menyebabkan adanya permasalahan antara perusahaan dengan pekerja mengenai upah yang sepatasnya diperoleh. Selain itu, kebijakan pengupahan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta mampu menahan inflasi. Upah pekerja perlu cukup layak dan terus meningkat supaya dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Peningkatan upah dan penghasilan pekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat pada umumnya, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁷

⁶ Devanto Shasta Pratomo, Putu Mahardika Adi Saputra, "Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkedilan: Tinjau UUD 1945", Journal Of Indonesian Applied Economics, Vol 5 No. 2 Oktober 2011, h. 270.

⁷ Luh Kertiasih, "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015", ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol: 9 No: 1 Tahun: 2017.

Tabel 1.1**Upah Minimum Regional (Rupiah) Tahun 2012-2018 Sesumatera**

No	Provinsi	Upah Minimum Regional (Rp)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Aceh	1400000	1550000	1750000	1900000	2118500	2500000	2700000
2.	Sumatera Utara	1200000	1375000	1505850	1625000	1811725	1961354	2132188
3.	Sumatera Barat	1150000	1350000	1490000	1615000	1800725	1949284	2119067
4.	Riau	1238000	1400000	1700000	1878000	2095000	2266722	2464154
5.	Jambi	1142500	1300000	1502300	1710000	1906650	2063000	2243718
6.	Sumatera Selatan	1195220	1630000	1825000	1974346	2206000	2388000	2595995
7.	Bengkulu	930000	1200000	1350000	1500000	1605000	1730000	1888741
8.	Lampung	975000	1150000	1399000	1581000	1763000	1908447	2074673
9.	Bangka Belitung	1110000	1265000	1640000	2100000	2341500	2534673	2755443
10.	Kepulauan Riau	1015000	1365087	1665000	1954000	2178710	2358454	2563000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa UMR di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi jika dibandingkan dengan provinsi lain Provinsi Lampung dapat dikategorikan memiliki upah yang rendah. Pada tahun 2012 UMR di Provinsi Lampung sebesar Rp.975.000, ditahun 2013 UMR di Provinsi Lampung sebesar Rp.1.150.000, ditahun 2014 UMR di Provinsi Lampung sebesar Rp.1.399.000, ditahun 2015 UMR di Provinsi Lampung sebesar Rp.1.581.000, selanjutnya ditahun 2016 UMR di Provinsi Lampung sebesar Rp.1.763.000, ditahun 2017 UMR di Provinsi Lampung sebesar Rp.1.908.447, kemudian pada tahun 2018 UMR di Provinsi Lampung sebesar Rp.2.074.673.

Pemerintah menetapkan ketentuan upah minimum. Dijelaskan bahwa upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal membayar upah dengan harapan kebutuhan dasar relatif mendekati terjangkau. Namun, kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja, sehingga belum berhasil menciptakan industrial seperti yang diharapkan.⁸

Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Untuk mengukur keluarga itu itu dapat hidup secara layak atau tidak maka dilihat dari kesejahteraan pekerja dalam memperoleh upah. Kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral,

⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.110.

sehingga perlu penetapan Upah Minimum Regional (UMR) yang mengacu pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHL). Pemerintah menetapkan upah berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁹

Tabel 1.2

**Upah Minimum Regional dan Kebutuhan Hidup Layak Provinsi Lampung
Pada Tahun 2012-2018 (Rupiah)**

No.	Tahun	UMR	KHL
1.	2012	975.000	1.008.109
2.	2013	1.150.000	1.060.082
3.	2014	1.399.000	1.399.037
4.	2015	1.581.000	1.442.858
5.	2016	1.763.000	1.963.272
6.	2017	1.908.447	2.129.868
7.	2018	2.074.673	2.296.464

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas Kebutuhan Hidup Layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum di provinsi Lampung dari tahun 2012 sampai 2018 selalu mengalami peningkatan. Jika nilai KHL merupakan nilai kebutuhan minimum hidup seorang pekerja maka upah minimum belum mencapai target minimum berdasarkan KHL pekerja. Artinya upah minimum di provinsi Lampung masih berada dibawah nilai KHL. Pada tahun 2012 upah

⁹ Ninda Noviani Charysa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011”, Economics Development Analysis Journal 2 (4) (2013), h.279.

minimum hanya sebesar 975.000 sedangkan KHL nya sebesar 1.008.109 dan pada tahun 2016 upah minimum hanya sebesar 1.763.000 sedangkan KHL nya sebesar 1.963.272 dan pada tahun 2017 upah minimum hanya sebesar 1.908.447 sedangkan KHL nya sebesar 2.129.868 dan ditahun 2018 upah minimum hanya sebesar 2.074.673 sedangkan KHL nya sebesar 2.296.464.

UMR di Provinsi Lampung belum sesuai dengan harapan masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Jika dibandingkan dengan daerah lain UMR di Provinsi Lampung masih dikategorikan rendah, tidak sesuai dengan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya. Permasalahan ini tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan perkembangan UMR yang diduga disebabkan oleh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi.

Faktor yang mempengaruhi UMR adalah tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga. Salah satu komponen penetapan upah minimum adalah inflasi di provinsi masing-masing, inflasi merupakan salah satu dari masalah penting dalam suatu perekonomian, dimana masalah ini semakin memburuk jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Pada satu sisi inflasi dapat disebabkan oleh kurangnya produksi dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Sementara itu pada sisi lain, inflasi dapat juga disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dalam suatu perusahaan, yang akan mengakibatkan meningkatnya harga hasil produksi. Tingginya laju inflasi mendorong pekerja menuntut terjadinya peningkatan upah minimum. Kondisi ini dapat menyebabkan

terjadinya permasalahan pokok pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang.¹⁰

Tabel 1.3

Laju Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2012-2018 (Persen)

No	Tahun	Laju Inflasi Provinsi Lampung (%)
1.	2012	4,30
2.	2013	7,67
3.	2014	8,36
4.	2015	4,65
5.	2016	2,75
6.	2017	3,14
7.	2018	2,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung diketahui bahwa inflasi di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,36%, sedangkan inflasi terendah di Provinsi Lampung pada tahun 2016 sebesar 2,75.¹¹

Lalu selanjutnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana

¹⁰ Safrida, Sofyan, Nura Syahrani, “Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh”, Agrisep Vol (15) No. 2, 2014, h.45-46.

¹¹ Badan Pusat Statistik, Laporan Perekonomian Indonesia 2018, h.81.

aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.¹²

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ada dua, yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan faktor non ekonomi terdiri dari faktor sosial, faktor manusia, dan faktor politik dan administratif.¹³

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi untuk menghasilkan pertambahan output, yang umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas berdasarkan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga per tahun berjalan, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai tahun dasar.¹⁴

¹² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2002), h.103.

¹³ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.67.

¹⁴ Himawan Yudhistira Dama, Agnes L Ch Lopian, Jacline I. Summual, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No. 03 Tahun 2016, h.549.

Tabel 1.4

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Harga Konstan

Tahun 2012-2018 (Persen)

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (%)
1.	2012	6,44
2.	2013	5,77
3.	2014	5,08
4.	2015	5,13
5.	2016	5,14
6.	2017	5,16
7.	2018	5,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami fluktuasi. Ditahun 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,77% dan ditahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 5,08%, lalu ditahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung cukup mengalami kenaikan.¹⁵

Menurut Sadono suatu perekonomian mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB, tanpa memandang bahwa kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pemerintah mengacu pada perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB yang menunjukkan seberapa besar andil

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2017*, (Lampung : Badan Pusat Statistik), h. 10

dari sektor-sektor tersebut pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari peningkatan upah minimum di daerah, apabila UMR meningkat maka secara tidak langsung akan membuat kenaikan harga-harga dipasaran.

Dampak dari pertumbuhan inflasi pada suatu perekonomian oleh sebagian ahli disebutkan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor penting untuk stimulator dari pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga secara umum tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah kerja, akan tetapi berpengaruh langsung terhadap keuntungan yang akan bertambah. Menurut Zanetti berpendapat bahwa perubahan harga (inflasi) secara sistematis mempengaruhi upah akan tetapi perubahan upah berpengaruh terhadap perubahan harga (inflasi) jauh lebih sensitif dari pada pengaruh inflasi terhadap perubahan upah di suatu negara.¹⁶

Hakikatnya dalam islam memerintahkan para pengusaha/majikan untuk menghargai kerja keras dan memenuhi kewajiban terhadap para pekerja/buruh dengan memberikan hak-hak serta jaminan. Sebagaimana yang telah diterangkan didalam QS. Al-Ahqaf, 46:19:¹⁷

¹⁶ Retno Ayu Wulansari, Zainuri, Regina Niken Wilantari, “*Hubungan Kausalitas Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Di Indonesia Periode 1997-2014*”, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015, h.2.

¹⁷ Al-Qur'an Cordoba, PT Internasional Indonesia, Bandung, 2012, h. 504

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf :19).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memberi upah yang layak atau yang minimal dapat mencukupi kebutuhan pokok kepada pekerja/buruh mereka.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari upah minimum di daerah. Apabila UMR meningkat maka secara tidak langsung akan membuat kenaikan harga-harga dipasaran. Diasumsikan bahwa ketika seseorang memperoleh upah yang lebih besar maka seseorang tersebut akan menggunakan upahnya untuk membeli secara berlebih, sehingga ketika UMR naik maka inflasi juga akan lebih tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ninda Noviani Charysa yang menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional (UMR) dengan metode *Random Effect Model (REM)*, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara parsial berpengaruh terhadap tingkat upah minimum regional.¹⁸

Sedangkan menurut Ilham Kristanto yang menganalisis penetapan upah minimum dengan menggunakan metode analisis deskriptif, memiliki hasil

¹⁸ Ninda Noviani Charysa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011”, *Economics Development Analysis Journal* 2(4) (2013).

bahwa KHL dan PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penetapan upah minimum.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahma Mardekawaty dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum kabupaten/kota dengan metode *Cross Section* menghasilkan dan menyimpulkan bahwa PDRB yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi dan IHK yang merupakan indikator dari inflasi signifikan berpengaruh secara positif pada upah minimum regional.¹⁹

Dari hasil penelitian dan latar belakang di atas masih terdapat perbedaan dan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang: “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2018”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018?
3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018?

¹⁹ Rahmah Mardekawaty, Dwi Ispriyanti, Sugito, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model *Spatial Autoregressive (SAR)*”, Journal Gaussian, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016.

4. Bagaimana upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tingkat inflasi terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisa upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018.

- 2) Masyarakat Provinsi Lampung : Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi faktual yang berkaitan dengan pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Syaria'ah yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- 2) Akademisi : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah Minimum Regional

Upah masih tetap menjadi persoalan utama negara berkembang seperti di Indonesia. Kebijakan pasar kerja Indonesia yang dualistik dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah di lain sisi sehingga menyebabkan upah menjadi isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan. Upah minimum menjadi perhatian banyak kalangan dalam bentuk perundang-undangan perburuhan mengenai pengupahan. Perlindungan ini diperlukan karena terjadinya ketidakseimbangan kekuatan pengusaha dan keinginan kaum buruh. Negara-negara yang menerapkan upah rendah mendapatkan tekanan internasional untuk menaikkan upah minimum atau akan berhadapan dengan sanksi perdagangan. Sanksi tersebut bisa berupa peningkatan tarif ekspor ke suatu negara lainnya.²⁰

Pemikiran dasar penetapan upah minimum adalah bahwa upah minimum merupakan langkah memperoleh penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan aspek produktivitas dan kemajuan perusahaan. Setiap tahun, penentuan upah selalu menjadi bahasan utama diantara pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja.²¹ Mekanisme penetapan upah minimum antara negara satu dengan negara lainnya memiliki perbedaan-perbedaan sejalan dengan adanya perbedaan sistem hubungan

²⁰ Vivi Alatas dan Lisa A Cameron, "The Impact of Minimum Wages on Employment in A Low-Income Country: A Quasi-Natural Experiment in Indonesia", *Industrial and Labor Relations Review*, 61(2), 2008, h.202.

²¹ Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2002).

industrial tradisi pembuatan keputusan kebijakan publik serta tahap pembangunan ekonomi. Variasi mekanisme penetapan upah minimum tidak disebabkan karena sifat-sifat teknis mekanisme itu sendiri, tetapi karena derajat dukungan yang diberikan pada program upah minimum oleh pemerintah.²²

Upah minimum berlaku selama 1 tahun dan merupakan upah bulanan terendah yang diterima semua jenis status buruh, yang masih lajang dan memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun dan ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) dan/atau bupati/walikota. UMP/UMR adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi, ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Depeprov yang unsurnya tripartit yaitu pengusaha, pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja, ditambah perguruan tinggi yang pakar. Penentuan UMP/UMR ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal 1 Januari.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penetapan upah. Menurut Gregory Mankiw, serikat pekerja adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan pemberi kerja mengenai upah, dan kondisi kerja. Serikat pekerja merupakan sejenis kartel, yaitu sekelompok penjual bekerja sama dengan harapan menggunakan daya pasar bersama mereka. Banyak pekerja dalam perekonomian membahas upah, tunjangan, dan kondisi kerja mereka dengan perusahaan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok.

²² Gerald Starr, *Minimum Wage Fixing*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1997), hal.14.

Proses disepakatinya syarat-syarat kerja antar serikat pekerja, dan perusahaan disebut dengan tawar menawar kolektif (*collective bargaining*).²³

Menurut Pratomo mengemukakan dalam menentukan tingkat upah minimum tingkat inflasi atau indeks harga konsumen merupakan komponen dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum. Diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum menyatakan bahwa didalamnya terdapat perubahan tingkat upah minimum pemerintah dengan melihat inflasi atau indeks harga konsumen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan upah minimum. Kenaikan upah berhubungan dengan inflasi. Pada tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi), pengusaha cenderung meningkatkan upah untuk merekrut pekerja terbaik. Sebagai kompensasi harga output harus ditingkatkan. Peningkatan harga output berarti laju inflasi meningkat. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot merugikan masyarakat penerima upah.²⁴

Faktor lain menurut Sukirno menjelaskan bahwa PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Dalam penetapan upah minimum pihak Pemerintah dan Dewan Pengupahan akan tetap mempertimbangkan faktor PDRB dalam proses penetapan upah minimum. Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga

²³ Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h.123.

²⁴ Ilham Kristanto, *Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember*, (Skripsi: 2013), h.14.

kerja yang diukur dengan output PDRB maka upah minimum selanjutnya ditingkatkan. Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan.²⁵

Selanjutnya faktor lainnya yaitu pendapatan perkapita adalah hasil perbandingan antara PDRB dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita ini akan mempengaruhi nilai upah minimum karena pendapatan perkapita merupakan tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Ketika pendapatan perkapita naik, maka nilai upah minimum juga meningkat karena masyarakat akan membeli barang dan jasa yang disediakan oleh produsen, sehingga laba para pengusaha meningkat, dan pengusaha mampu membayar pekerja dengan upah tinggi. Jadi tingkat kemakmuran masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai upah minimum.²⁶

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR), peneliti mengambil faktor tingkat inflasi sebagai variabel X1 dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel X2 dengan upah minimum regional sebagai variabel Y.

²⁵ *Ibid*, h.28.

²⁶ Febrika Nurtiyas, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, tahun 2016, h.169-170.

1. Pengertian Upah

Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap paling penting, sebab melalui jasa tenaga kerja inilah sumber daya alam dapat berubah menjadi hasil produksi yang bernilai. Untuk itu, atas pengorbanannya dan kerjanya tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari majikan atau perusahaannya berupa penghasilan dalam bentuk upah.²⁷

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.²⁸

Menurut Sadono Sukirno mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja.²⁹ Dalam kamus Bahasa Indonesia upah didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 2, h.361.

²⁸ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.141.

²⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.350.

dibayarkan.³⁰ Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga perunit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunya skala produksi disebut dengan efek skala produksi.
- b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).³¹

³⁰ Abdullah Pius dan Prasetya Danu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arko1 1998), h.602.

³¹ Febrika Nurtiyas, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, tahun 2016, h.167.

2. Dasar Hukum Upah Minimum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.78 Tahun 2015, Upah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.³²

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam pasal 41-50 Undang-Undang No.78 Tahun 2015. Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas:³³

- 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:
 - a. Upah tanpa tunjangan
 - b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seseorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan BAB IV, Pasal 1.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan BAB IV, Pasal 41.

kebutuhan 1 (satu) bulan. Komponen dan pelaksanaan tahap pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.³⁴

Pemerintah menetapkan upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. Namun kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang diharapkan.

3. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum Propinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDRB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

³⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), h.109.

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

Δ PDBRt = Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.³⁵

4. Teori Upah

a. Teori Upah Efisiensi

Menurut teori efisiensi, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berapa diatas ekuilibrium, jadi akan lebih menguntungkan jika perusahaan tetap mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga kerja berlebih. Menurut teori upah efisiensi membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efisiensi para pekerja.

Ada beberapa jenis teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Gregory Mankiw untuk menjelaskan mengapa perusahaan mau membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja diantaranya:³⁶

1) Kesehatan Pekerja

Teori upah efisiensi yang berkaitan dengan kesehatan pekerja. Para pekerja yang memperoleh upah yang lebih tinggi dapat mengkonsumsi lebih banyak nutrisi, dan dengan demikian akan lebih sehat dan lebih produktif. Sebuah perusahaan mungkin

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2018.

³⁶ Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h.133-134.

menguntungkan untuk membayar upah tinggi dan memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktif, daripada membayar upah yang rendah tetapi memiliki pekerjaan yang tidak sehat dan kurang produktif, jenis teori upah ini lebih relevan untuk di negara yang sedang berkembang.

2) Perputaran Pekerja

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan hubungan antara upah dengan perputaran kerja. Pekerja berhenti bekerja karena beberapa alasan pindah ketempat kerja lain, pindah ke kota lain, meninggalkan angkatan kerja dan lain-lain. Frekuensi perputaran ini tergantung pada insentif-insentif yang mereka hadapi yaitu manfaat terus bekerja *versus* manfaat berhenti bekerja. Semakin tinggi upah dibayar kepada tenaga kerja semakin rendah pekerja akan berhenti dari pekerjaannya, jadi sebuah perusahaan dapat mengurangi perputaran pekerja dengan membayar upah yang lebih tinggi. Alasan kekhawatiran perputaran pekerja tersebut adalah akan lebih mahal bagi perusahaan untuk merekrut dan melatih pekerja-pekerja baru.

3) Kerja Keras Pekerja

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan bagaimana keterkaitan antara upah dengan kerja keras pekerja. Dalam banyak pekerjaan, pekerja bekerja secara bebas, akibatnya perusahaan harus memantau kinerja pekerja tersebut, dan bagi para pekerja yang

terbukti melalaikan tanggung jawab mereka akan dipecat. Tetapi tidak semua yang lalai yang bisa tertangkap secara langsung karena pemantauan pekerja mahal dan tidak efisien.

4) Kualitas Pekerja

Jenis teori upah efisiensi ini menyatakan bahwa kualitas rata-rata dari armada kerja perusahaan bergantung pada upah yang ia bayarkan pada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, para pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan dimana saja, meninggalkan perusahaan dengan para pekerja tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif. Para ekonom menyadari penyaringan yang tidak menyenangkan ini sebagai contoh dari seleksi kebalikan, kecenderungan orang dengan lebih banyak informasi untuk menyeleksi diri sendiri dalam cara yang dilakukan orang-orang yang tidak beruntung dengan lebih sedikit informasi. Dengan membayar upah di atas keseimbangan, perusahaan bisa menurunkan seleksi kebalikan, meningkatkan kualitas rata-rata armada kerjanya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

b. Teori Malthus

Salah seorang tokoh mazhab klasik ini meninjau upah dalam kaitannya dengan perubahan penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor strategis yang di pakai untuk menjelaskan berbagai hal. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran.

Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (*supply side economies*) yang akhir-akhir ini menjadi populer lagi. Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja, juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja, seperti diutarakan di muka bahwa sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk, usia kerja yang sudah barang tentu bersumber dari penduduk.

Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah. Sebaliknya pun secara simetris tingkat upah akan naik bila penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Oleh karena itu, dilihat dari sisi lain usaha menaikkan tingkat upah tidak akan ada faedahnya dalam jangka panjang sebab bila upah lebih tinggi dari semula, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu untuk mempunyai keluarga besar.

c. Teori John Stuart Mills

Mills adalah seorang tokoh mazhab klasik yang pendapatnya dapat menyimpulkan bahwa tingkat upah juga tidak akan beranjak dari tingkat semula, namun dengan alasan yang berbeda. Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana (*wage funds*) untuk pembayaran upah. Dunia usaha menyediakan sebagian dari dananya yang diperuntukkan bagi pembayaran upah.

Pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi

tersebut. Dari dua tokoh klasik ini dapat disimpulkan ada kesan pesimisme bahwa tingkat upah hanya berkisar pada tingkat yang rendah.

Seberapa tingkat rendah tersebut, yaitu tingkat yang dapat mempertahankan kehidupan. Mempertahankan mempunyai implikasi mengacu pada apa yang ada atau yang lalu. Bila yang lalu rendah, maka yang akan datang rendah. Masa dimana pendapatan ini berkembang secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya revolusi industri yang menyerap tenaga kerja secara massal dengan upah rendah. Disamping karena rendahnya keterampilan mereka, hal ini juga karena sikap kurang begitu menghargainya pemimpin usaha terhadap tenaga kerja.³⁷

d. Teori Upah Menurut Pertambahan Produk Marginal

Teori neo klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori produktivitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor

³⁷ Afrida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h.150.

produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut.

Dari konsep di atas kemudian dikenal istilah Marginal Product of labour (MPL), yaitu tambahan output yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan input sejumlah satu unit. Dalam pandangan klasik, MPL inilah yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima oleh tenaga kerja ($MPL = W/P$). Teori ini didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, di mana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari karyawan.

Dalam pandangan ilmu ekonomi konvensional upah riil sangat tergantung kepada produktifitas dari tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori permintaan keatas produksi. Upah yang diterima oleh pekerja terutama tergantung pada produktivitas tenaga kerja. Data kenaikan upah di berbagai negara maju, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara kenaikan upah riil pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Selain menggunakan data, analisis juga dapat menunjukkan grafis hubungan antara produktivitas dengan upah riil.

e. Teori Upah Berdasarkan Daya Beli

Kemajuan industri tidak mungkin wujud kecuali dengan adanya kecukupan permintaan yang menjamin distribusi produk dengan harga yang menghasilkan keuntungan normal bagi perusahaan. Di sisi lain

kaum pekerja dan keluarganya adalah salah satu konsumen terbesar produk- produk tersebut. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada kenaikan tingkat permintaan atas barang dan jasa, dan sebaliknya penurunan tingkat upah akan berpengaruh pada penurunan permintaan atas barang dan jasa karena penurunan daya beli. Penurunan daya beli ini berikutnya akan berpengaruh pada kemampuan penyerapan pasar atas barang yang diproduksi sehingga berakibat turunnya omzet dan keuntungan perusahaan.

Pendukung teori ini menyatakan jika daya beli masyarakat atas barang turun sedang tingkat upah tetap, maka biaya produksi akan naik, karena tenaga kerja adalah unsur utama produksi. Penurunan daya beli akan berpengaruh pada penurunan produksi. Jika tingkat upah tidak diturunkan maka berakibat pada meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang akan naik dan berakibat hilangnya daya beli pasar sama sekali.³⁸

5. Dinamika Pengupahan

Struktur upah tidak statis melainkan dinamis. Beberapa penyebab dinamikanya adalah sebagai berikut :

- 1) Produktivitas, karena produktivitas merupakan sumber yang dapat menambah pendapatan perusahaan, maka bila produktivitas naik maka upah juga cenderung naik. Produktivitas berubah karena perbaikan

³⁸ Ismā'īl Ibrāhīm al-Badawī, al-Tawzī' wa al-Nuqūd fī al-Iqtisād al-Islāmi wa al- Iqtisād al- Waq'ī (Kuwait: Authorship Translation & Publication Committee, Kuwait University, 2004), h.84-85.

dalam modal insan yang terbenam dalam tenaga kerja atau karena perubahan teknologi.

- 2) Besarnya penjualan, penjualan merupakan sumber pendapatan usaha yang menentukan kemampuan membayar.
- 3) Laju inflasi, bagi sebuah rumah tangga, daya beli merupakan unsur yang penting dari upah yang diterimanya dan bukan upah nominalnya. Oleh karena itu, laju inflasi yang digunakan untuk mendefinisikan upah nominal menjadi upah riil sangat penting.
- 4) Sikap pengusaha, kecepatan tingkat upah tergantung sikap pengusaha dalam menghadapi hal-hal yang dapat mengakibatkan upah berubah.
- 5) Institusional, undang-undang mengharuskan perusahaan besar untuk mengadakan kesepakatan kerja bersama dengan serikat pekerja yang memang diinginkan oleh anggotanya.³⁹

6. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Konsep Dasar Upah Dalam Islam

Dalam Islam, buruh atau karyawan bukan hanya suatu jumlah atau usaha yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja. Mereka yang mempekerjakan tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.⁴⁰ Sebagai seorang karyawan yang telah menyumbangkan tenaganya bagi kesuksesan tempatnya bekerja selain

³⁹ Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.159.

⁴⁰ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h.58.

memiliki kewajiban karyawan juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan salah satunya adalah upah.⁴¹

Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah SAW, telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu, selain itu Rasulullah juga menentukan untuk berperilaku baik kepada pelayannya. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan dan memberikan ketenangan, mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁴²

Islam juga mengakui bahwa adanya perbedaan upah yang diterima oleh karyawan. Upah yang diberikan haruslah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat maka upah para pekerja harus dinaikkan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, atau menentukan upah pegawai tidak berlebihan tidak juga terlalu sedikit.⁴³ Tujuan utamanya adalah agar para pegawai mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka tidak

⁴¹ Samrotul Puadah, *Dampak Kemajuan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.71.

⁴² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.202.

⁴³ *Ibid*, h.203.

terdorong untuk melakukan tindakan yang dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya.⁴⁴

b. Penetapan Upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Dalam menentukan besaran upah, maka kepentingan pekerja dan pengusaha akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka untuk itu negara perlu menetapkan tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak terzalimi dan harus sewaktu-waktu dipantau dan ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-hari.

Teori afzarul rahman terhadap penetapan upah minimum adalah upah atau gaji memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Negara sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dan tidak akan pernah memperbolehkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimu agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

⁴⁴ *Ibid*, h.203.

Tingkat upah minimum haruslah adil dan layak karena itu upah disuatu negara harus memahami kebutuhan hidup layak. Sementara untuk penetapan tingkat upah maksimum harus ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya. Islam juga melarang tingkat upah dibawah upah minimum yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, selain itu islam melarang pemberian upah yang melebihi tingkat tertentu berdasarkan sumbangsih pekerja tersebut dalam proses produksi, hal ini tercantum dalam surat Q.S An-Najm ayat 39, yaitu :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya : *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya”*.

Dan surat Q.S Yaasiin ayat 54, yaitu :

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya : *“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan”*.

Jika suatu waktu upah jatuh berada dibawah tingkat upah minimum atau upah berada di atas tingkat upah maksimum, maka negara berkewajiban dan mempunyai hak yang sah untuk campur tangan dalam menentukan tingkat upah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi konflik

antara pekerja dan pengusaha yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai islam. *Pertama*, memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. *Kedua*, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendaknya dan sesuai keahliannya, tanpa ada batasan yang bisa menimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerjaan atau dalam memiliki pekerjaan tersebut dari segi geografi. Kebebasan dalam mobilisasi kerja diantara daerah dan pekerjaan yang berada membantu menjaga kestabilan upah seluruh negeri.⁴⁵

B. Tingkat Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Pengendalian tingkat inflasi atau menjaga kestabilan harga merupakan salah satu masalah utama makroekonomi, disamping beberapa masalah makroekonomi penting lainnya seperti mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pendistribusian pendapatan yang adil dan merata. Sebagai indikator perekonomian yang sangat penting, fenomena inflasi telah banyak mendapat perhatian para ahli ekonomi.⁴⁶

⁴⁵ Fordeby dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Edi 1 Cet 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.241.

⁴⁶ Adrian Sutawijaya dan Zulfahmi, "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 8, Nomor 2, September 2012.

Definisi inflasi menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Makro Ekonomi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.⁴⁷ Sedangkan menurut Mandala Manurung pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.⁴⁸

Menurut Adi Warmankarim secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas atau jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.⁴⁹

Dari beberapa pengertian inflasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda.

⁴⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.14.

⁴⁸ Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2008), h.89.

⁴⁹ *Ibid*, h.91

2. Teori Inflasi

a. Demand Pull Inflation

Demand pull inflation terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregat dimana kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh (*full employment*). Kenaikan kesempatan agregatif (*aggregate demand*) selain dapat menaikkan harga-harga juga dapat meningkatkan produksi. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output (produksi) tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang biasa juga disebut Inflasi Murni (Pure Inflation). Namun jika pertambahan permintaan melebihi Gross National Product (GNP) pada kondisi kesempatan kerja penuh, ini akan mengakibatkan terjadinya Inflationary Gap dan selanjutnya terjadilah inflasi.⁵⁰

b. Cost Push Inflation

Cost Push Inflation pada kondisi ini tingkat penawaran lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat permintaan. Ini karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran total (*aggregate supply*) terus menurun karena semakin mahalnya biaya produksi. Apabila keadaan tersebut berlangsung cukup lama, maka terjadilah inflasi yang disertai dengan resesi.

⁵⁰ Tajul Khalwaty, *Inflasi dan Solusinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.15-16.

Kenaikan biaya produksi yang menimbulkan *cost push inflation* didorong oleh beberapa faktor, salah satunya karena adanya tuntutan kenaikan upah dari pekerja yang biasanya dikoordinasi oleh organisasi serikat buruh atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁵¹

c. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki antara kelompok-kelompok yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bias disediakan oleh masyarakat tersebut, proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*).⁵²

d. Teori Strukturalis

Teori strukturalis menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara sedang berkembang. Menurut teori ini ada beberapa hal yang dapat menimbulkan inflasi dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang adalah :

- 1) Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan pada sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena supply atau

⁵¹ *Ibid.*, h.20.

⁵² Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No 2 Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2001), h.161.

produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga. Kelambanan pertumbuhan penerimaan ekspor ini berarti kelambanan pertumbuhan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi dan investasi).

- 2) Ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan dalam negeri. Kenaikan bahan makanan ini mendorong kenaikan upah karyawan, sehingga meningkatkan biaya produksi yang nantinya menaikkan harga barang. Kenaikkan harga barang-barang ini menimbulkan kenaikan upah lagi, yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga-harga. Demikian seterusnya, dimana proses tersebut akan berhenti seandainya bahan makanan tidak terus naik.⁵³

3. Jenis-Jenis Inflasi

Masalah inflasi dalam perekonomian suatu negara di satu sisi dapat berdampak positif, tetapi disisi lain sering berdampak negative. Dalam jenis-jenis inflais dibagi menjadi berbagai jenis yaitu sebagai berikut:

b. Berdasarkan Tingkat Keparahan

- 1) Inflasi ringan (kurang dari 10% pertahun)
- 2) Inflasi sedang (antara 10%-30% pertahun)
- 3) Inflasi berat (antara 30%-100% pertahun)
- 4) Hiperinflasi (lebih dari 100%).⁵⁴

⁵³ Adrian Sutawijaya dan Zulfahmi, "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia", Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol 8 Nomor 2, September 2012, h.94-95.

⁵⁴ P. Eko Prasetyo, *Fundamental Macro Ekonomi*, (Yogyakarta: BetaOifset, 2013), h.198.

c. Berdasarkan Penyebabnya

- 1) Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.
- 2) Inflasi desakan biaya, inflasi ini terjadi ketika perekonomian berkembang pesat pada saat tingkat pengangguran sangat rendah.
- 3) Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan.⁵⁵

4. Akibat Buruk Inflasi

Inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk, baik terhadap orang perorang, maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Karena itulah berbagai upaya yang dilakukan terutama pemerintah dengan senantiasa mencari jalan untuk menghindari atau mengatasinya. Inflasi yang tinggi akan mendorong perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik mengakibatkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan mengalihkan uang yang ia miliki untuk tujuan spekulasi misalnya membeli tanah, rumah atau lainnya, sehingga investasi produk akan berkurang, akibatnya kegiatan perekonomian akan menurun dan terjadi pengangguran.

⁵⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana), h.177.

Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk terhadap pedagang. Komoditas ekspor tidak akan bias bersaing dipasar internasional, karena itu volume menurun. Sementara dipihak lain, harga komoditas didalam negeri menjadi naik dan impor justru menjadi murah. Akibatnya kuantitas impor akan menjadi lebih banyak dari pada ekspor, sehingga cadangan devisa menjadi berkurang dan neraca pembayaran akan menjadi lebih buruk.⁵⁶

Salah satu akibatnya yaitu inflasi cenderung menurunkan keseimbangan kesejahteraan individu masyarakat. Para pelaku ekonomi seperti pekerja yang bergaji tetap, inflasi biasanya berjalan lebih cepat dari pada kenaikan upah para pekerja. Upah riil pekerja merosot disebabkan inflasi, dan ini berarti tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat dengan sendirinya akan terus merosot.

5. Hubungan Tingkat Inflasi dengan Upah Minimum Regional

Cost Push Inflation merupakan teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan antara inflasi dengan upah. Cost Push Inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran agregat (aggregate supply, AS) sebagai akibat kenaikan produksi. Apabila keadaan tersebut berlangsung cukup lama, maka terjadilah inflasi yang disertai dengan

⁵⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), h.186.

resesi. Akibat dari kenaikan biaya produksi yang menimbulkan Cost Push Inflation ini adalah tuntutan kenaikan upah dari para pekerja.⁵⁷

Cacino berpendapat bahwa hubungan kausalitas antara perubahan upah dan inflasi berjalan di dua arah yang berarti perubahan upah dan inflasi saling mempengaruhi. Sedangkan menurut Zanetti berpendapat bahwa perubahan harga (inflasi) secara sistematis mempengaruhi upah akan tetapi perubahan upah berpengaruh terhadap perubahan harga (inflasi) jauh lebih sensitif dari pada pengaruh inflasi perubahan upah disuatu negara.⁵⁸

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.⁵⁹ Jika disimpulkan inflasi mempunyai hubungan dengan upah minimum karena naik turunnya upah dipengaruhi oleh faktor harga (inflasi).

6. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

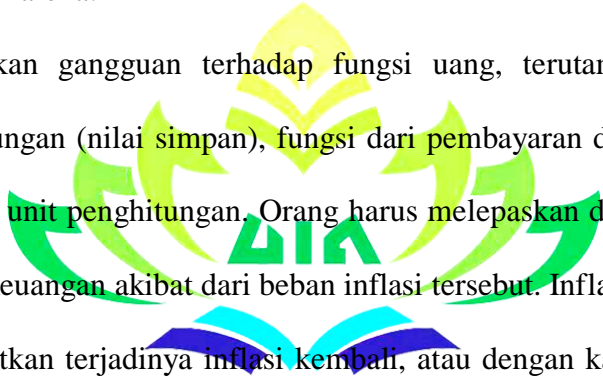
Ekonomi islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku

⁵⁷ Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia", Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, September 2012, h.88.

⁵⁸ Retno Ayu Wulansari, Zainuri, Regina Niken Wilantari, "Hubungan Kausalitas Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Di Indonesia Periode 1997-2014", Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015, h.2.

⁵⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.181.

sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selain itu, dalam pelaksanaannya ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan permasalahan. Pertama, ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, ketidakstabilan dari system ekonomi yang ada saat ini menimbulkan berbagai macam gejala dalam kegiatannya. Dan dalam ekonomi islam hal yang demikian itu insya Allah tidak akan terjadi.⁶⁰ Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

- 
- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan asset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain '*self feeding inflation*'.
 - b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*).
 - c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*).
 - d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukkan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam

⁶⁰ *Ibid*, h.189.

mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.⁶¹

Ekonomi Islam Taqiuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi (1364M-1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu :

a. Natural Inflation

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah). Ibn Al-Maqriz mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). Jika memakai perangkat analisis konvensional yaitu persamaan identitas $MV = PT = Y$, dimana M (jumlah uang beredar); V (kecepatan peredaran uang); P (tingkat harga); T (jumlah barang dan jasa); dan Y (tingkat pendapatan nasional /GDP). Maka *Natural Inflation* dapat diartikan sebagai:

- 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T). Misalnya $T \downarrow$ sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya $P \uparrow$.
- 2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar dari pada nilai impor, sehingga secara netto terjadi

⁶¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.139.

impor uang yang mengakibatkan $M \downarrow$ sehingga jika V dan T tetap maka $P \uparrow$.

b. Human Error Inflation

Inflasi yang disebabkan oleh *Human Error Inflation* terjadi karena: (*Corruption and bad administration*) korupsi dan buruknya administrasi pengangkatan para pejabat berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan karena kapasitas akan menempatkan orang-orang pada berbagai jabatan penting dan terhormat yang tidak mempunyai kredibilitas. Mereka yang mempunyai mental seperti ini, rela menggadaikan seluruh harta milik untuk meraih jabatan, kondisi ini juga berpengaruh ketika mereka berkuasa, para pejabat tersebut akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk menutupi kebutuhan financial pribadi atau keluarga atau demi kemewahan hidup. Akibatnya akan terjadi penurunan drastis terhadap penerimaan dan pendapatan negara.

Korupsi akan mengganggu tingkat harga, karena para produsen akan menaikkan harga jual barangnya untuk menutupi biaya-biaya siluman yang telah mereka keluarkan. Dimasukkannya biaya siluman dalam biaya produksi (*cost of goods sold*) akan menaikkan total biaya produksi. ATC dan MC menjadi ATC₂ dan MC₂. Sehingga harga jual menjadi naik dari P menjadi P_2 . Hal ini menjadi tidak merefleksikan nilai sumber daya sebenarnya yang digunakan dalam proses produksi. Harga yang terjadi terdistorsi oleh komponen yang seharusnya tidak

ada sehingga lebih lanjut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) pada akhirnya akan terjadi inefisiensi alokasi sumber daya yang tentu akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.⁶²

C. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang.

Untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat ditunjukkan oleh kenaikan GDP atau PDRB.⁶³ Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output per kapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup.⁶⁴ Dalam penetapan upah minimum pemerintah, dan dewan pengupahan akan tetap menggunakan laju PDRB. Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan PDRB, maka upah

⁶² *Ibid*, h.140-141.

⁶³ Amri Amir, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, investasi, dan Inflasi di Indonesia," (Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 1, No. 02 Januari 2013, h.15)

⁶⁴ Paul A Samuelson dan Wiliam, dkk, Makroekonomi. Edisi 14. (t.tp: Erlangga, 1992), h.257.

selayaknya ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah yang dinilai atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}). Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi yaitu:⁶⁵

$$PERT\ PDRB = X = \frac{PDRB - PDRB_{t-1}}{PDRB_t - 1} \times 100\% \dots \dots (1)$$

2. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan “*Laissezfaire*” atau system mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan perekonomian suatu masyarakat. Para ekonom mempelajari masalah pertumbuhan ekonomi telah menemukan bahwa mesin kemajuan ekonomi harus bertengger diatas empat roda yang sama, baik di negara miskin maupun negara kaya. Keempat faktor pertumbuhan itu adalah : sumber daya manusia (penawaran tenaga

⁶⁵ Adelfina, I Made Jember, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 5, No 10, Oktober 2016 (PP.1011-1167),.h.5.

kerja, kesehatan, pendidikan, motivasi), sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan).⁶⁶

Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipicu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, tabungan akan meningkat, dan investasi juga akan bertambah. Hal ini meningkatkan stok modal yang ada. Skala produksi meningkat dan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja sehingga tingkat upah juga meningkat. Yang terakhir ini selanjutnya mengakibatkan jumlah suplai tenaga kerja meningkat yang akhirnya akan menurunkan tingkat produktivitas dan keuntungan karena berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing return*) karena terbatasnya jumlah sumber daya alam (SDA), seperti luas tanah. Proses ini selanjutnya mengakibatkan produksi, permintaan tenaga kerja dan juga tingkat upah menurun.⁶⁷

Teori Adam Smith sering dianggap sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan ekonomi secara sistematis. Mengenai faktor yang menentukan pembangunan, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat

⁶⁶ Firman Dadang, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 1985-2004* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h.55.

⁶⁷ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.44.

kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi akan meninggikan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.⁶⁸

Kemudian David Ricardo, menurut teori ini pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, di atas atau di bawah tingkat upah alamiah (atau minimal). David Ricardo juga melihat adanya perubahan teknologi yang selalu terjadi, yang membuat meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan memperlambat proses *diminishing return* kemerosotan tingkat upah dan keuntungan kearah tingkat minimumnya.⁶⁹

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik berfungsi sebagai alat dasar untuk memahami proses pertumbuhan negara maju dan telah diterapkan dalam studi empiris mengenai sumber pertumbuhan ekonomi. Pendapat Neo-Klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut: adanya akumulasi capital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan merupakan proses yang gradual, perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif, adanya pemikiran yang optimis

⁶⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP 2006), h. 244-245.

⁶⁹ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h.44.

terhadap perkembangan, aspek-aspek internasional merupakan faktor bagi perkembangan.⁷⁰

Menurut Solow yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya pertambahan modal dan tenaga kerja. Faktor terpenting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.⁷¹ Dalam model Solow, proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah (jumlah capital dan tenaga kerja atau rasio dari kedua faktor ini dalam sebuah proses produksi atau produk tidak harus konstan, atau saling mensubstitusi) dan tingkat upah tenaga kerja dan suku bunga juga bisa berubah. Jika jumlah tenaga kerja tumbuh melebihi jumlah stok capital, upah akan relatif turun terhadap suku bunga. Atau sebaliknya, jika pertumbuhan capital melebihi pertumbuhan tenaga kerja, maka suku bunga akan turun relatif terhadap upah. Fleksibilitas harga faktor produksi ini yang memungkinkan jalur pertumbuhan dalam model ini bisa menjadi stabil.⁷²

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Pertumbuhan ekonomi modern Simom Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya”, pertumbuhan kemampuan ini didasarkan kepada

⁷⁰ Suryana, *Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Graha Ilmu. 2000) h.92.

⁷¹ Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h.437.

⁷² Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h.47-48.

kemampuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Berdasarkan definisi ini maka ada tiga komponen pokok yang sangat penting artinya :

- 1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan pewujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.
- 2) Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup.
- 3) Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideology juga harus dilakukan. Pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan masyarakat ; Persyaratan Lepas Landas, Tahap Kematangan, Masyarakat Berkonsumsi Tingkat Tinggi.⁷³

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :⁷⁴

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Cepat lambatnya proses pembangunan itu tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan

⁷³ John Martinuksen, *Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi Walt Whitman Rostow* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.61.

⁷⁴Eka Pratiwi Lumbantoruan,dkk, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi), Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 2 No. 2, h.3.

memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang betumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat dapat mendorong proses pembangunan akan tetapi, hal tersebut dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya mempunyai suatu fungsi sebagai pendorong proses pembangunan tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi pembangunan.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk memperoleh dan mengelola sumber daya alam (SDA) dan dapat meningkatkan kualitas IPM.

Menurut Tadoro dan Smith ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:⁷⁵

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berupa tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resource*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung lalu kemudian dapat diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dimasa mendatang. Investasi juga harus disertai investasi infrastuktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal berkaitan dengan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja, sedangkan semakin banyak penambahan penduduk dan meningkatnya potensi dasar domestiknya.
3. Kemajuan teknologi, kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara yang lama yang diperbaiki melalui pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada dua klasifikasi kemajuan teknologi. *Pertama*, kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi intup yang sama. *Kedua*,

⁷⁵ Michael P. Tadoro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi ke-9*. Haris Munandar dan Puji, penerjemah, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.170.

kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga (*labor saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Upah Minimum Regional

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi untuk menghasilkan pertambahan output, yang umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah.⁷⁶ Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output per kapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup.⁷⁷

Pemerintah dalam menetapkan upah minimum mempertimbangkan beberapa faktor lain yaitu kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, tingkat upah pada umumnya di daerah yang bersangkutan, biaya hidup dan perubahannya, system jaminan sosial nasional, kondisi dan kemampuan perusahaan, serta tujuan nasional seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas.

Menurut Ardana, salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian upah yaitu kondisi perekonomian. Bila kondisi perekonomian sedang maju maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar,

⁷⁶ Himawan Yudhistira Dama, Agnes L Ch Lopian, Jacline I. Summual, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No. 03 Tahun 2016, h.549.

⁷⁷ Paul A Samuelson dan Wiliam, dkk, Makroekonomi. Edisi 14. (t.tp: Erlangga, 1992), h.257.

karena mendekati kondisi *full employment*. Sebaliknya jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka tingkat upah akan rendah karena terdapat banyak pengangguran (*disquashed un employment*).⁷⁸

PDRB merupakan faktor yang mempengaruhi upah minimum. PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam satu tahun tertentu atau periode tertentu di wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tetapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dari output PDRB, maka upah selayaknya akan meningkat.⁷⁹

5. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam melakukan pembangunan yang sangat mendasar salah satu ciri menonjol dari kecenderungan yang dominan adalah kepercayaan yang sangat kuat bahwa masyarakat harus ditata diatas landasan Al-Qur'an dan Sunnah, ini berarti bahwa nilai-nilai, asas-asas, ketentuan-ketentuan, dan peraturan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah harus dijunjung dengan tinggi dalam rangka mengembangkan bidang-bidang ekonomi.⁸⁰

⁷⁸ Luh Kertiasih, "Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015", ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol 9 No 1 Tahun 2017.

⁷⁹ Febrika Nurtiyas, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, tahun 2016, h.169.

⁸⁰ Lalu Muhammad Iswandi, "Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam", (Jurnal Lidan Al-Hal, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, NTB, 2013), h.367

Ekonomi islam pada dasarnya memandang pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan :*“a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare”* yang artinya pertumbuhan terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.⁸¹ Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan sebagian ahli mengatakan istilah sebagai *“economic development is growth plus change”* yang artinya pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi.⁸² Dengan kata lain ekonomi pembangunan menanggulangi masalah kegiatan ekonomi seperti sektor pertanian dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Menurut Mahsury bahwa pembangunan ekonomi menurut islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 9 berikut ini.:

⁸¹Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.2, (7 Desember 2016), h.4.

⁸²*Ibid.*

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Qs. An-Nisa : 4 : 9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak untuk dikhawatirkan karena untuk mendapatkan kesejahteraan hendaklah bertakwa dan berusaha dalam meningkatkan ekonomi. Salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Lincoln pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur atau tidak. apabila pembangunan ekonomi disuatu daerah tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸³ Dari penjelasan diatas dapat di jelaskan apabila pembangunan ekonomi disuatu daerah tinggi ataupun turun makan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui banyaknya angkatan kerja, pendidikan yang tinggi dan pendapatan ekonomi.

⁸³I Putu Arya Finkayana, “Made Heny Urmila Dewi, Analisis Pertumbuhan Eknomi danIndikator Impisit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi Bali Tahun 2004 2013”,*Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*,Vol.5, No. (7 Juli 2016),h.877.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Kertiasih, yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap UMR, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi dengan uji t diperoleh nilai t.hitung lebih kecil dari t.tabel yaitu $-0.079 < 2.0369$ dengan nilai signifikansi $0.938 > 0.05$, (2) tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap UMR, hal ini dapat dilihat dari nilai t.hitung yang lebih kecil dari nilai t.tabel yaitu $-0.151 < 2.0369$ dengan nilai signifikansinya sebesar $0.881 > 0.05$, dan (3) tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap UMR, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi dengan uji F diperoleh F.hitung lebih kecil dari nilai F.tabel yaitu $0.015 < 4.17$ dengan nilai signifikansi $0.985 > 0.05$.⁸⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Ayu Wulansari, Zainuri, Regina Niken Wilantari, yang berjudul “Hubungan Kausalitas Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Di Indonesia Periode 1997-2014”. Kondisi inflasi dan upah di Indonesia saat ini masih mengalami fluktuasi yang menjadi permasalahan untuk Indonesia dimana penetapan upah di masing-masing

⁸⁴ Luh Kertiasih, ”Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015”, ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol: 9 No: 1 Tahun: 2017.

wilayah Indonesia berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausalitas granger untuk mengetahui hubungan antar kedua variabel penelitian. Hasil dari penelitian ditemukan hubungan kausalitas searah antara UMP Wilayah Jawa dan Inflasi Indonesia pada Lag 5. Sedangkan hubungan kausalitas tidak ditemukan pada inflasi Indonesia dan UMP di Wilayah Luar Jawa. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam menstabilkan inflasi serta penetapan upah minimum yang sesuai dengan kondisi sumber daya yang terdapat pada wilayah Indonesia yang bertujuan sebagai pemerataan kesejahteraan penduduk.⁸⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Noviani Charysa, dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011”. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap upah minimum regional. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel model random effect (REM) dengan metode Generalized Least Square (GLS). Jenis data yang digunakan berupa gabungan data time series (periode 2008-2011) dan cross section (35 kabupaten/kota) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian adalah koefisien positif dari pertumbuhan

⁸⁵ Retno Ayu Wulansari, Zainuri, Regina Niken Wilantari, “*Hubungan Kausalitas Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Di Indonesia Periode 1997-2014*”, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.

ekonomi adalah 20,561 yang berarti jika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka UMR juga naik sebesar Rp 13.564.⁸⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penentuan variabel Y adalah dengan mengumpulkan data upah minimum regional (UMR) di pulau sumatera yang bersumber pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Dengan hasil bahwa Provinsi Lampung dapat dikategorikan memiliki upah terendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau sumatera. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR). Pada variabel Y mengacu pada indikator kebutuhan hidup layak (KHL) yang merupakan salah satu ukuran untuk menentukan upah. Di dalam penelitian ini juga mengkaji bagaimana Ekonomi Islam menjawab masalah antar variabel.

E. Kerangka Pemikiran

Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Upah memainkan peranan yang sangat penting dalam ketenagakerjaan. Upah merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui bahwa nilai upah minimum regional di Provinsi Lampung masih dibawah rata-rata kebutuhan

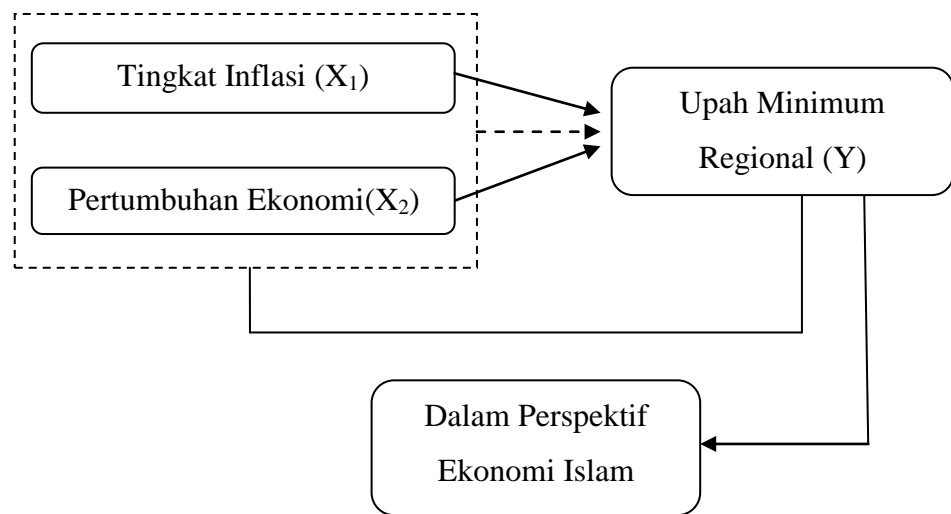
⁸⁶ Ninda Noviani Charysa, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011", Economics Development Analysis Journal 2 (4) (2013).

hidup layak (KHL). Penentu kebijakan upah minimum adalah Pemerintah Daerah Provinsi dengan menerima usulan dari Dewan Pengupahan yang bersifat independen. Dalam kebijakan ini pemerintah mempertimbangkan faktor tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

UMR di Provinsi Lampung belum sesuai dengan harapan masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Jika dibandingkan dengan daerah lain UMR di Provinsi Lampung masih dikategorikan rendah, tidak sesuai dengan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya. Permasalahan ini tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan perkembangan UMR diduga disebabkan oleh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi.

Teori Afzarul Rahman terhadap penetapan upah minimum adalah upah atau gaji memenuhi kebutuhan seseorang. Negara sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dan tidak akan pernah memperbolehkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran dituangkan dalam gambar berikut ini. dimana variabel X1 yaitu tingkat inflasi dan variabel X2 yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap variabel Y yaitu upah minimum regional (UMR)



Keterangan :

—————→ : Pengaruh secara parsial

-----→ : Pengaruh secara simultan

Kerangka pikir di atas ini menunjukkan bagaimana upah minimum regional (UMR) dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi kemudian menganalisis secara parsial bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional (UMR) lalu dianalisis secara simultan dan kemudian dilihat seberapa besar tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung dan dianalisis dalam perspektif ekonomi islam.

F. Hipotesis

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional

Salah satu komponen penetapan upah minimum adalah laju inflasi di masing-masing provinsi. Menurut Soekirno, inflasi merupakan salah satu dari masalah penting dalam suatu perekonomian, dimana masalah ini semakin memburuk jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Pada satu sisi inflasi dapat disebabkan oleh kurangnya produksi dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Sementara itu pada sisi lain, inflasi dapat juga disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dalam suatu perusahaan, yang akan mengakibatkan meningkatnya harga hasil produksi. Tingginya laju inflasi mendorong pekerja menuntut untuk terjadinya peningkatan upah minimum.⁸⁷

Di dalam teori kuantitas, dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (*demand*) sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Teori kuantitas membedakan sumber inflasi menjadi dua, yakni teori Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation.

Pada kondisi Cost Push Inflation, tingkat penawaran lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat permintaan. Ini karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai jumlah tertentu. Penawaran total (*aggregate supply*) terus menurun karena semakin mahalnya biaya produksi. Apabila keadaan

⁸⁷ Safrida, Sofyan, Nura Syahrani, "Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh", *Agrisep* Vol (15) No. 2, 2014, h.45-46.

tersebut berlangsung cukup lama, maka terjadilah inflasi disertai dengan resesi.

Kenaikan biaya produksi yang menimbulkan *cost push inflation* didorong oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah adanya tuntutan kenaikan upah dari parah pekerja yang biasanya dikoordinir oleh organisasi serikat buruh.⁸⁸ Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₁: Tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional

Penetapan besarnya upah minimum mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja. Teori efisiensi menyebutkan, dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh diatas upah keseimbangan, sehingga produksi akan meningkat. Jumlah tingkat output yang diproduksi disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini penting jika digunakan dalam penetapan nilai upah minimum karena tingkat output yang diproduksi akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Jika laba meningkat, maka tingkat upah minimum selayaknya juga meningkat.

⁸⁸ Tajul Khalwaty, *Op.cit*, 2000, h.20.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahma Merdekawati, Dwi Isprianti dan Sugito, penelitian ini dijelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi upah minimum adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi. Penetapan gaji atau upah minimum dilaksanakan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.⁸⁹ Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₂ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018.

3. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional

Hasil penelitian Ninda Noviani Charysa berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di Kabupaten/Kota Jawa Tengah mengatakan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap upah minimum regional di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

⁸⁹ Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti, Sugito, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR)", Jurnal Gaussian, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, h.527.

H₃ : Tingkat Inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap upah minimum regional (UMR) di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2018



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, Zainudin Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Boediono, 2001. *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No 2 Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- BR, Arfida, 2007. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dadang, Firman, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 1985-2004*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fordeby dan Adesy, 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam Edi 1 Cet 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ghazali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hakim, Lukman, 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Iqbal, 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasyim, Ali Ibrahim, 2016. *Ekonomi Makro*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Huda, Nurul, 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul, 2016. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana.
- Jhingan, M.L., 2013. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kadir, 2015. *Statistika terapan Kosep, Contoh dan Analisis data Dengan program Spss/lisrel dalam penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Adiwarman, 2011. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kartono, Kartini, 1995. *Pengantar Metode Research*. Kencana Alumni: Bandung

Khalwaty, Tajul, 2000. *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Manan, Muhammad Abdul, 1992. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermasa.

Mankiw, Gregory, 2000. *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Martinuksen, John, 2010. *Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi Walt Whitman Rostow*, Jakarta: Rineka Cipta.

Paul A Samuelson dan Wiliam, 1992. *Makroekonomi*. Edisi 14. Erlangga.

Prasetyo, P. Eko, 2013. *Fundamental Macro Ekonomi*, Yogyakarta: BetaOifset.

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi&Makroekonomi)*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rasul, Agung Abdul, 2010. *Praktikum Statistika Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Simanjuntak, Payaman J, 2002. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

Siregar, Syofian , 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Starr, Gerald, 1997. *Minimum Wage Fixing*, Jakarta: Penerbit Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna, 2015. *Spss Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.

Sukirno, Sadon, 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.

Sukirno, Sadono, 2000. *Makro Ekonomi Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono, 2002. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Radja Grafindo.

Sukirno, Sadono, 2013. *Teori Pengantar Ekonomi, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Radja Grafindo

Sukirno, Sadono, 2013. *Teori Pengantar Mikroekonomi*, PT RajaGrafindo Persada.



Sumarsono, Sonny, 2013. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryana, 2000. *Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: Graha Ilmu.

Tadoro, Michael P dan Stephen C. Smith, 2011. *Pembangunan Ekonomi ke-9*. Haris Munandar dan Puji, penerjemah, Jakarta: Erlangga.

Tambunan, Tulus, 2011. *Perekonomian Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Wijayanti, Asri, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zariah Nurul ,2007. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara)

Jurnal

Adelfina, I Made Jember, 2016 “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 5, No 10, Oktober 2016 (PP.1011-1167).

Ahmad Ma'ruf, Latri Wihastuti, “Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesi: Determinan dan Prospeknya”, Jurnal Ekonomi dan Studi pembangunan Volume 9 Nomor 1, April 2008.

Ambar Dwi Santoso, Bonar M.Sinaga, Sri Hartoyo, dan M. Parulian Hutagaol, “Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Migrasi Internal Di Sulawesi Selatan”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411-0903 : Eissn: 2443-2660, Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 177-187.

Badan Pusat Statistik, *”Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dan rata-rata Nasional pertahun (Dalam Rupiah).*

Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia 2018.*

Badan Pusat Statistik, *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2017*, (Lampung : Badan Pusat Statistik).

Devanto Shasta Pratomo, Putu Mahardika Adi Saputra, “Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkedilan: Tinjau UUD 1945”, Journal Of Indonesian Applied Economics, Vol 5 No. 2 Oktober 2011.

Eka Pratiwi Lumbantoruan,dkk, *“Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi),* Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 2 No. 2.

Febrika Nurtiyas, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, tahun 2016.

Himawan Yudhistira Dama, Agnes L Ch Lopian, Jacline I. Summual, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No. 03 Tahun 2016.

I Putu Arya Finkayana, "Made Heny Urmila Dewi, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Impisit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi Bali Tahun 2004 2013", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.5, No. (7 Juli 2016).

Lalu Muhammad Iswandi, "*Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*", (Jurnal Lidan Al-Hal, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, NTB, 2013).

Luh Kertiasih, "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015", *ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, Vol: 9 No: 1 Tahun: 2017.

Ninda Noviani Charysa, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011", *Economics Development Analysis Journal* 2 (4) (2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan BAB IV, Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan BAB IV, Pasal 41.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan BAB IV, Pasal 43-45.

Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti, Sugito, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR)*", *Jurnal Gaussian*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Retno Ayu Wulansari, Zainuri, Regina Niken Wilantari, "Hubungan Kausalitas Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Di Indonesia Periode 1997-2014", *Artikel Ilmiah Mahasiswa* 2015.

Safrida, Sofyan, Nura Syahrani, "Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh", *Agrisep* Vol (15) No. 2.

Sutawijaya, Adrian dan Zulfahmi, "*Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia*", Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, September 2012.

Syahrina Syam, Abdul Wahab, "Pengaruh Upah Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar", Iqtisaduna, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015.

Vivi Alatas dan Lisa A Cameron, "*The Impact of Minimum Wages on Employment in A Low-Income Country: A Quasi-Natural Experiment in Indonesia*", Industrial and Labor Relations Riview, 61(2).



